

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, tekanan harga di Kabupaten Mahakam Ulu **masih berada pada level tinggi dan cenderung stagnan**, meskipun telah dilakukan berbagai intervensi pengendalian inflasi. Mahakam Ulu sebagai daerah **non-IHK** tetap menghadapi tekanan inflasi riil yang dirasakan masyarakat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Berdasarkan data perkembangan harga bulan Desember 2025:

- Sejumlah komoditas strategis berada pada **harga tertinggi di Kalimantan Timur**, antara lain:
 - Cabai rawit merah mencapai Rp80.000/kg,
 - Daging ayam ras Rp60.000/kg,
 - LPG 3 kg Rp56.250/tabung,
 - Beras medium Rp18.500/kg .
- Harga beberapa komoditas utama **tidak mengalami perubahan selama empat minggu berturut-turut**, menunjukkan stagnasi harga pada level tinggi akibat terbatasnya pasokan dan rendahnya dinamika pasar.
- Secara regional, pada akhir Desember 2025 harga komoditas di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun **Mahakam Ulu tidak sepenuhnya mengikuti tren penurunan tersebut** karena faktor struktural dan biaya logistik tinggi

Risiko ke depan:

- Ketergantungan penuh pada pasokan luar daerah dan tingginya biaya distribusi berpotensi menjaga harga tetap tinggi.
- Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (Nataru) meningkatkan risiko lonjakan permintaan.
- Tanpa penguatan infrastruktur logistik dan cadangan pangan, tekanan inflasi di Mahakam Ulu berpotensi berlanjut pada awal tahun 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Ketergantungan struktural pada pasokan luar daerah**, dengan minimnya produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
2. **Biaya logistik sangat tinggi**, dipengaruhi oleh keterbatasan akses darat, ketergantungan jalur sungai, serta volume distribusi yang kecil.
3. **Ukuran pasar yang kecil dan persaingan usaha terbatas**, menyebabkan harga cenderung stagnan pada level tinggi dan tidak responsif terhadap penurunan harga regional.
4. **Belum tersedianya gudang penyangga/logistik pangan permanen**, sehingga pemantauan dan pengendalian stok belum optimal.
5. **Intervensi harga bersifat temporer**, sehingga dampaknya lebih terasa pada keterjangkauan jangka pendek, belum mampu menurunkan harga pasar secara struktural

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui TPID melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi TPID

Dalam rangka penguatan koordinasi dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan forum koordinasi strategis pada Triwulan IV Tahun 2025, yaitu:

◦ Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Mahakam Ulu

Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan pada Jumat, 19 September 2025, bertempat di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahakam Ulu.

Rapat membahas perkembangan harga dan ketersediaan komoditas strategis, khususnya beras medium dan premium, LPG tabung 3 kg, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Dalam rapat tersebut disepakati penguatan sinergi program 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), termasuk optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP di seluruh kecamatan.

◦ High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Mahakam Ulu

High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, dalam rangkaantisipasi stabilitas harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

HLM TPID ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, perangkat daerah yang tergabung dalam TPID, instansi vertikal, serta mitra strategis seperti Bank Indonesia, BPS, dan Bulog. Dalam forum HLM tersebut dibahas:

- Tingginya tekanan harga komoditas strategis di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah non-IHK,
- Tantangan struktural pengendalian inflasi akibat ketergantungan pasokan luar daerah dan tingginya biaya logistik,
- Evaluasi efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan, termasuk Gerakan Pangan Murah.

Hasil HLM TPID dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah, yang menjadi acuan utama penyusunan langkah pengendalian inflasi daerah serta rencana kerja TPID Tahun 2026 .

Pelaksanaan rapat dan High Level Meeting TPID tersebut menjadi landasan strategis pengambilan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Mahakam Ulu pada Triwulan IV Tahun 2025, baik dalam konteks pengendalian jangka pendek menjelang HBKN maupun penguatan kebijakan struktural ke depan.

2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Sebagai intervensi utama pengendalian inflasi Triwulan IV:

- GPM Kecamatan Long Apari dilaksanakan pada Oktober 2025.
- GPM Kecamatan Long Pahangai dilaksanakan pada tanggal 20-22 Oktober 2025 dengan

penyaluran 1.000 paket sembako (beras SPHP, minyak goreng, gula) senilai Rp100.000 per paket.

Pelaksanaan GPM berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun dampaknya terhadap harga pasar bersifat sementara

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Capaian

- Koordinasi TPID lintas sektor berjalan efektif.
- GPM terbukti menjaga keterjangkauan pangan pada periode tertentu.
- Monitoring harga dilakukan secara konsisten sebagai early warning.

2. Keterbatasan

- Intervensi GPM belum mampu menurunkan harga pasar secara signifikan.
- Belum tersedianya gudang logistik menyebabkan stok pangan tidak fleksibel.
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum terlaksana pada tahun 2025 akibat keterlambatan APBD Perubahan.

3. Penilaian Evaluatif

Kebijakan pengendalian inflasi Triwulan IV Tahun 2025 efektif dalam mitigasi risiko jangka pendek, namun belum mampu menyelesaikan tekanan inflasi yang bersifat struktural. Diperlukan pendekatan jangka menengah dan panjang untuk menekan biaya logistik dan memperkuat pasokan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi Triwulan IV Tahun 2025, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

1. **Percepatan pembangunan dan/atau penyediaan gudang logistik pangan** sebagai solusi struktural pengendalian inflasi.
2. **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)** yang mulai direalisasikan pada tahun 2026.
3. **Optimalisasi GPM berbasis wilayah prioritas**, khususnya daerah dengan disparitas harga tinggi.
4. **Peningkatan efektivitas subsidi ongkos angkut pangan** agar distribusi tetap berjalan meskipun kondisi cuaca tidak mendukung.
5. **Penguatan sistem data harga dan stok pangan** sebagai dasar pengambilan kebijakan TPID yang lebih responsif.

Rekomendasi ini selaras dengan hasil **High Level Meeting TPID Kabupaten Mahakam Ulu** dan menjadi dasar penyusunan roadmap pengendalian inflasi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025-2027